



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 132 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.462.498.230.623,00 (dua triliun empat ratus enam puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp285.048.075.103,00 (dua ratus delapan puluh lima milyar empat puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu seratus tiga rupiah), yang terdiri dari :

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp86.360.500.000,00 (delapan puluh enam milyar tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari :

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak parkir;
- g. pajak air tanah;
- h. pajak sarang burung walet;
- i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
- k. bea perolehan hak atas tanah bangunan (BPHTB).

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari :

- a. pajak hotel sebesar Rp120.000.000,00;

- b. pajak losmen sebesar Rp5.000.000,00;
 - c. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) Rp10.000.000,00.
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), yang terdiri dari :
- a. pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp385.000.000,00;
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya sebesar Rp880.000.000,00;
 - c. pajak warung dan sejenisnya sebesar Rp2.035.000.000,00;
 - d. jasa boga/catering dan sejenisnya sebesar Rp2.700.000.000,00.
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang terdiri dari :
- a. Pajak tontonan film sebesar Rp30.000.000,00;
 - b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp70.000.000,00;
 - c. pajak pertandingan olahraga sebesar Rp100.000.000,00.
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari :
- a. pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron sebesar Rp525.000.000,00;
 - b. pajak reklame kain sebesar Rp150.000.000,00.
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp185.500.000,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp9.745.135.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha;
 - c. retribusi perijinan tertentu.

- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.732.500.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebesar Rp46.000.000,00;
 - b. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebesar Rp9.000.000,00;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp4.707.500.000,00
 - d. retribusi pelayanan pasar sebesar Rp1.850.000.000,00;
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp425.000.000,00;
 - f. retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp70.000.000,00;
 - g. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp625.000.000,00.
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.362.600.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp303.600.000,00;
 - b. retribusi terminal sebesar Rp70.000.000,00;
 - c. retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp235.000.000,00;
 - d. retribusi rumah potong hewan Rp25.000.000,00;
 - e. retribusi tempat rekreasi dan olahraga Rp600.000.000,00;
 - f. retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp129.000.000,00.
- (4) Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp650.035.000,00 (enam ratus lima puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. retribusi ijin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp35.000,00; dan
 - b. retribusi persetujuan bangunan gedung sebesar Rp650.000.000,00.

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp12.227.517.924,00 (dua belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp176.714.922.179,00 (seratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. pendapatan dari pengembalian;
 - h. pendapatan BLUD.

- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp233.489.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. hasil penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp103.514.000,00;
 - b. hasil penjualan gedung dan bangunan sebesar Rp129.975.000,00.
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp308.150.000,00 (tiga ratus delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas hasil sewa BMD.
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri dari :
 - a. jasa giro pada kas daerah sebesar Rp2.500.000.000,00;
 - b. jasa giro pada kas di bendahara sebesar Rp50.000.000,00;
 - c. jasa giro pada rekening dana BOS sebesar Rp50.000.000,00.
- (5) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang terdiri atas hasil pengelolaan dana bergulir.
- (6) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang terdiri atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara.
- (7) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- (8) pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang terdiri dari :
 - a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp1.000.000,00;
 - b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp1.000.000,00.
- (9) pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp172.569.283.179,00 (seratus tujuh puluh dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas pendapatan BLUD dari jasa layanan.

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.166.950.155.520,00 (dua triliun seratus enam puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.990.637.723.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana desa; dan
 - c. insentif fiskal.
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.736.354.745.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) Rp248.628.721.000,00;
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) Rp1.058.394.928.000,00;
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp142.049.830.000,00;
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik Rp287.281.266.000,00.
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp231.211.830.000,00 (dua ratus tiga puluh satu milyar dua ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Dana Desa.
- (5) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp23.071.148.000,00 (dua puluh tiga milyar tujuh puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas Insentif Fiskal.
- (6) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp176.312.432.520,00 (seratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 10

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah dari pemerintah pusat.

Pasal 11

Belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.492.874.051.957,00 (dua triliun empat ratus sembilan puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp1.750.339.657.553,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;

- b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.051.158.618.828,00 (satu triliun lima puluh satu milyar seratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp701.011.203.263,00;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp107.790.373.470,00;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebesar Rp159.531.534.138,00;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp24.653.854.155,00;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp933.688.999,00;
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp993.120.000,00;
 - g. belanja pegawai BLUD Rp56.244.844.803,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp554.105.130.225,00 (lima ratus lima puluh empat milyar seratus lima juta seratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja barang, meliputi :
 - 1) belanja barang pakai habis sebesar Rp91.273.162.792,00;
 - 2) belanja barang tak habis pakai sebesar Rp174.356.000,00;
 - 3) belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp562.799.400,00.
 - b. belanja jasa, meliputi :
 - 1) belanja jasa kantor sebesar Rp125.745.047.850,00;
 - 2) belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp28.914.502.180,00;
 - 3) belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp3.609.963.900,00;
 - 4) belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp1.132.363.000,00;
 - 5) belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp5.095.000,00;
 - 6) belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp12.549.000,00;
 - 7) belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp5.206.763.000,00;
 - 8) belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar Rp6.138.005.740,00;
 - 9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimtek serta diklat sebesar Rp20.727.352.000,00;
 - 10) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp105.000.000,00;
 - 11) belanja sewa aset tidak berwujud sebesar Rp71.725.000,00.
 - c. belanja pemeliharaan, meliputi :
 - 1) belanja pemeliharaan tanah sebesar Rp98.000.000,00;
 - 2) belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp6.134.811.386,00;
 - 3) belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp5.143.488.000,00;
 - 4) belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp3.961.670.000,00;
 - d. belanja perjalanan dinas, meliputi belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp45.749.234.950,00;

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, meliputi :
 - 1) belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp33.668.000.000,00;
 - 2) belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp1.075.951.400,00.
 - f. belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp65.973.957.000,00;
 - g. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp108.621.332.627,00.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp130.817.268.500,00 (seratus tiga puluh milyar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebesar Rp44.960.000.000,00;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sebesar Rp83.348.988.500,00;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp2.508.280.000,00.
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.258.640.000,00 (empat belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja bantuan sosial kepada individu.

Pasal 13

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp302.984.942.404,00 (tiga ratus dua milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja modal tanah
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. belanja modal asset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.844.892.823,00 (tiga puluh empat milyar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja modal alat besar sebesar Rp3.562.385.950,00;
 - b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp3.903.983.050,00;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp8.706.000,00;
 - d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp1.102.696.000,00;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp4.848.906.160,00;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp310.150.000,00;

- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp1.780.195.352,00;
 - h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp4.049.600,00;
 - i. belanja modal komputer sebesar Rp4.112.612.843,00;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebesar Rp3.427.588.000,00;
 - k. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp378.000.000,00;
 - l. belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp154.000.000,00
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS sebesar Rp5 5.433.149.400,00;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD Rp5.818.470.468,00.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.591.661.281,00 (empat puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp46.007.000.000,00;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp1.584.661.281,00;
- (5) belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp201.453.933.100,00 (dua ratus satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp185.492.675.100,00;
 - b. belanja modal bangunan air sebesar Rp14.661.258.000,00;
 - c. belanja modal instalasi sebesar Rp1.000.000.000,00;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebesar Rp300.000.000,00.
- (6) belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.462.942.200,00 (enam milyar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp226.800.000,00;
 - b. belanja modal hewan sebesar Rp26.828.600,00;
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS sebesar Rp6.209.313.600,00.
- (7) belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.131.513.000,00 (tiga milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 14

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp436.749.452.000,00 (empat ratus tiga puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.626.622.000,00 (sembilan milyar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebesar Rp8.636.172.000,00;
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebesar Rp990.450.000,00.
- (3) belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp427.122.830.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh milyar seratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 16

- (1) Pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp30.375.821.334,00 (tiga puluh milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri dari :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp40.875.821.334,00 (empat puluh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas alam/tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, rincian Objek dan sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 18

Pelaksanaan penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 132



KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	285.048.075.103,00
4.1.01	Pajak Daerah	86.360.500.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	135.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	120.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	120.000.000,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	5.000.000,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	5.000.000,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	10.000.000,00
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	10.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	6.000.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	385.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	385.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	880.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	880.000.000,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	2.035.000.000,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	2.035.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.700.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.700.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	200.000.000,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	30.000.000,00
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	30.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	70.000.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	70.000.000,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	100.000.000,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	100.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	675.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	525.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	525.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	150.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	150.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	35.000.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	35.000.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	35.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.11	Pajak Parkir	55.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	55.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	55.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	95.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	95.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	95.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	185.500.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	185.500.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	185.500.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	31.000.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	31.000.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	31.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	11.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	11.000.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	2.000.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	2.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	9.745.135.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	7.732.500.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	46.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	46.000.000,00
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	9.000.000,00
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	9.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.707.500.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.707.500.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.850.000.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	341.547.093,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	448.663.067,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.059.789.840,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	425.000.000,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	425.000.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	70.000.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	70.000.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	625.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	625.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.362.600.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	303.600.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	160.000.000,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	15.600.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	98.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	30.000.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	70.000.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	70.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	235.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	235.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	25.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	25.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	600.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	600.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	129.000.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	73.000.000,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	20.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	36.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	650.035.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	35.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	35.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	650.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	650.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.227.517.924,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	12.227.517.924,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.214.850.619,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.214.850.619,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	12.667.305,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	12.667.305,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	176.714.922.179,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	233.489.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	103.514.000,00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	103.514.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	129.975.000,00
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	129.975.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	308.150.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	308.150.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	308.150.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.600.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	50.000.000,00
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	50.000.000,00
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.000.000,00
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.000.000,00
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.000.000.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.000.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.000.000,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.000.000,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	1.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.000.000,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	200.000,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	200.000,00
4.1.04.15.08.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	200.000,00
4.1.04.15.08.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	200.000,00
4.1.04.15.08.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	200.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	172.569.283.179,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	172.569.283.179,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	172.569.283.179,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.166.950.155.520,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.990.637.723.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.736.354.745.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	248.628.721.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	9.166.259.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	15.998.351.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.571.583.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	28.919.325.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	183.381.492.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	4.193.920.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	26.695.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.094.634.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	1.672.084.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.604.378.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.058.394.928.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	970.909.561.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	800.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	20.636.865.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	31.189.999.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	23.597.909.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	11.260.594.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	142.049.830.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	480.763.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	15.292.469.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	9.998.771.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.169.971.000,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	22.045.000.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	51.761.509.000,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	14.210.475.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	10.028.047.000,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	13.473.158.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.589.667.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	287.281.266.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	145.890.855.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.775.721.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	405.889.000,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	8.657.470.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.208.650.000,00
4.2.01.01.04.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	74.221.420.000,00
4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	3.395.000.000,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	12.245.310.000,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	735.000.000,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.593.760.000,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	180.000.000,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	13.162.327.000,00
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	564.401.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	22.139.463.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	231.211.830.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	231.211.830.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	231.211.830.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	23.071.148.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	23.071.148.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	23.071.148.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	176.312.432.520,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	176.312.432.520,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	176.312.432.520,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	48.136.849.100,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.088.922.520,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	49.466.853.100,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	580.314.800,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	58.039.493.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.500.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	10.500.000.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	10.500.000.000,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	10.500.000.000,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	10.500.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.462.498.230.623,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.750.339.657.553,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.051.158.618.828,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	701.011.203.263,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	530.992.089.000,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	430.011.686.944,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	100.980.402.056,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	48.468.575.748,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	37.633.243.642,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.835.332.106,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.919.789.043,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.919.789.043,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	38.729.536.046,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	28.690.656.650,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	10.038.879.396,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.204.793.255,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.204.793.255,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	27.423.168.737,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	21.801.554.287,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.621.614.450,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.470.852.279,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.468.961.467,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.890.812,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	90.157.601,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	84.782.892,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.374.709,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	33.535.887.374,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	28.928.541.664,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.607.345.710,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.201.656.676,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	976.810.344,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	224.846.332,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.501.928.257,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.902.570.510,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	599.357.747,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.472.769.247,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.437.484.595,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	35.284.652,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	107.790.373.470,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	13.195.973.700,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13.195.973.700,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	8.212.097.400,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	8.212.097.400,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	78.006.370,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	78.006.370,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	86.304.296.000,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	86.130.077.400,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	174.218.600,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	159.531.534.138,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.188.482.882,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	4.000.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	232.000.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	6.000.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	38.142.882,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.320.000.000,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1.900.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.600.000,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	420.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.420.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.095.000.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	480.000.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	585.641.256,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	174.790.000,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.280.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	141.224.996,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	152.970.989,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	11.159.571,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	3.000.000,00
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	31.250.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	6.275.000,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.400.000,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	5.180.000,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	937.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	20.475.000,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.100.000,00
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	98.200,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	32.500.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	142.205.394.060,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	142.205.394.060,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	353.220.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	353.220.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.017.329.000,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.017.329.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.073.505.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.593.225.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	187.680.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	292.600.000,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	3.685.460.940,00
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	3.685.460.940,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	1.422.501.000,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	1.422.501.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.653.854.155,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	299.209.519,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	299.209.519,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	100.401.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	100.401.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	214.797.300,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	214.797.300,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.323.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.323.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	63.750.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	63.750.000,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	417.318,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	417.318,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.297.103.118,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	103.958.988,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	7.620.480,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	16.323.650,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.169.200.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.386.500.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.386.500.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430.290.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430.290.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	933.688.999,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.091.892,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.091.892,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	22.889.896,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	22.889.896,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.548.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.548.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.166.540,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.166.540,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	13.402.900,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	13.402.900,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.250,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.250,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.650.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.650.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	271.043,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	271.043,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	575.500,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	575.500,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	545.954.941,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.316.650,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	27.486.350,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.808.700,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	9.454.800,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	286.221.791,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	661.850,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.626.200,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	90.500,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.836.400,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	210.000.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.451.700,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	178.136.037,00
5.1.01.05.11.0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	82.500,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	21.180.000,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	16.675.805,00
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	5.000.000,00
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	5.362.500,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.016.700,00
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	724.782,00
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	268.750,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.775.000,00
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.000.000,00
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	50.000,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	119.000.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	56.244.844.803,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	56.244.844.803,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	56.244.844.803,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	554.105.130.225,00
5.1.02.01	Belanja Barang	92.010.318.192,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	91.273.162.792,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.302.445.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.548.047.400,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.568.916.594,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	649.571.700,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.650.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	16.110.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.767.160.171,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	287.876.430,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	3.385.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.118.783.700,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.181.471.150,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	608.267.850,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	75.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	563.127.266,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	235.183.565,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.785.481.507,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	250.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	751.184.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.109.948.611,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.264.965.240,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.429.850.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.097.789.932,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	125.260.000,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	57.926.226,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	900.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	340.390.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	5.067.048.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.751.465.950,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.960.213.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	70.000.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.050.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.274.978.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	45.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	184.860.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	232.650.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	422.661.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	254.625.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	28.700.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	8.250.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	338.463.500,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	468.782.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	269.475.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	174.356.000,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	14.000.000,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	160.356.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	562.799.400,00
5.1.02.01.04.0018	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	29.250.000,00
5.1.02.01.04.0038	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	90.000.000,00
5.1.02.01.04.0044	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	5.570.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.000.000,00
5.1.02.01.04.0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	27.000.000,00
5.1.02.01.04.0204	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	41.084.000,00
5.1.02.01.04.0405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	115.000.000,00
5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	154.895.400,00
5.1.02.01.04.0515	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	50.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	191.668.366.670,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	125.745.047.850,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.826.167.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.774.840.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	285.961.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	94.600.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	6.610.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	20.200.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	469.200.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	9.802.800.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	12.225.955.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	451.624.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.524.240.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	217.800.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	2.224.800.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	924.000.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	255.605.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	52.320.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	270.436.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.327.560.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.148.841.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.304.968.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.334.640.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.486.589.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.795.497.100,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	2.500.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	273.600.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	64.350.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	51.900.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	38.560.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	268.631.000,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	40.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.758.414.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	14.428.275.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	42.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	45.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	765.023.680,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	129.925.000,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	888.443.977,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.815.898.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	477.862.942,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	559.067.450,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	28.429.841.701,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	538.454.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.896.937.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	14.617.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	80.000.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	645.488.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	4.551.006.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	90.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	28.914.502.180,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.681.170.380,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	20.925.460.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.969.031.600,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	590.664.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	368.179.200,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	28.857.000,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	1.351.140.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.609.963.900,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	8.668.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	78.186.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	807.635.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.649.492.900,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	91.242.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	171.226.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	348.050.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	39.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.984.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	170.620.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	198.900.000,00
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	3.960.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	15.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.132.363.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	130.195.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	25.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	24.200.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	73.920.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	169.936.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	709.112.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.095.000,00
5.1.02.02.06.0126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	5.095.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	12.549.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	2.469.000,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	10.080.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.206.763.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.705.500.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	75.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	50.000.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	277.263.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	455.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	709.500.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.585.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	8.500.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	114.500.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	151.500.000,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	75.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.138.005.740,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	110.000.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	100.000.000,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	86.500.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.070.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.215.000.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	767.800.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	788.705.740,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.727.352.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.244.900.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	6.029.272.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	10.883.000.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	570.180.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	105.000.000,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	105.000.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	71.725.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	71.725.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	15.337.969.386,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	98.000.000,00
5.1.02.03.01.0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	98.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.134.811.386,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	400.000.000,00
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	60.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	24.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.215.000.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.225.220.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	85.000.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	85.000.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	264.500.000,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	5.324.820,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	40.000.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	91.000.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	10.446.566,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	636.840.000,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	25.000.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	275.000.000,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	55.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	66.000.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	806.460.000,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	40.000.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	179.220.000,00
5.1.02.03.02.0429	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya	60.000.000,00
5.1.02.03.02.0446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	4.000.000,00
5.1.02.03.02.0455	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya	7.200.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	309.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.143.488.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.585.000.000,00
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	71.156.000,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	50.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	50.000.000,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	485.000.000,00
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	54.332.000,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	300.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	458.000.000,00
5.1.02.03.03.0060	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	90.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.961.670.000,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	2.745.000.000,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	571.170.000,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	40.000.000,00
5.1.02.03.04.0072	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor	400.000.000,00
5.1.02.03.04.0100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	40.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	140.000.000,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	25.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	45.749.234.950,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.749.234.950,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.322.826.950,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	4.867.210.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.858.510.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.119.182.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	581.506.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	34.743.951.400,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.668.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	754.400.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	22.250.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	16.167.550.000,00
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	27.000.000,00
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	13.737.600.000,00
5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	2.959.200.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.075.951.400,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	935.051.400,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	140.900.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	65.973.957.000,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	65.973.957.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	65.973.957.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	108.621.332.627,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	108.621.332.627,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	108.621.332.627,00
5.1.05	Belanja Hibah	130.817.268.500,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	44.960.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	44.960.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	44.960.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	83.348.988.500,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	41.165.856.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.618.760.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	23.547.096.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	13.805.310.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	13.805.310.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	27.927.822.500,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	27.927.822.500,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	450.000.000,00
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	450.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.508.280.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.508.280.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.508.280.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.258.640.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	14.258.640.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	9.300.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	9.300.000.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	4.958.640.000,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	4.958.640.000,00
5.2	BELANJA MODAL	302.984.942.404,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.500.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	9.500.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	6.000.000.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	6.000.000.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	3.500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	3.500.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.844.892.823,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3.562.385.950,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.800.000.000,00
5.2.02.01.01.0009	Belanja Modal Loader	1.800.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.762.385.950,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	1.595.749.950,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	46.636.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	120.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.903.983.050,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.903.983.050,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	472.468.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	806.161.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.145.587.050,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	404.767.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.075.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.706.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	8.706.000,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	8.706.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.102.696.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.102.696.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	1.102.696.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.848.906.160,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	202.781.400,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	202.781.400,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.633.624.760,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.521.881.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	653.266.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	372.200.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	86.277.760,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.500.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	12.500.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	310.150.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	306.950.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	279.794.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	20.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	7.156.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	3.200.000,00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	3.200.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.780.195.352,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.762.684.231,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.762.684.231,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	17.511.121,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	17.511.121,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.049.600,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	4.049.600,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	4.049.600,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.112.612.843,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.788.912.843,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	438.478.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.819.256.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.531.178.843,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	323.700.000,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	210.000.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	113.700.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	3.427.588.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	3.427.588.000,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	290.000.000,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	3.137.588.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	378.000.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	378.000.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	378.000.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	154.000.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	154.000.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	154.000.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.433.149.400,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.433.149.400,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.433.149.400,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.818.470.468,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.818.470.468,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.818.470.468,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.591.661.281,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	46.007.000.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	43.807.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.107.000.000,00
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	200.000.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.500.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	25.129.000.000,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.000.000.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	180.000.000,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	456.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.900.000.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.335.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.200.000.000,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	2.200.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.584.661.281,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.584.661.281,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.584.661.281,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	201.453.933.100,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	185.492.675.100,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	168.995.575.100,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	149.720.469.500,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	8.100.000.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	11.175.105.600,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	16.497.100.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	16.497.100.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	14.661.258.000,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	13.852.658.000,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	13.852.658.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	808.600.000,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	808.600.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.000.000.000,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.000.000.000,00
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	1.000.000.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	300.000.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	300.000.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	300.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.462.942.200,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	226.800.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	200.000.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	200.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	26.800.000,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	26.800.000,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	26.828.600,00
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	26.828.600,00
5.2.05.03.02.0001	Belanja Modal Ternak Potong	26.828.600,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.209.313.600,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.209.313.600,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.209.313.600,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.131.513.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	3.131.513.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	3.131.513.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.871.513.000,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	1.260.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.800.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.800.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.800.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.800.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.800.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	436.749.452.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.626.622.000,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.636.172.000,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.636.172.000,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.636.172.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	990.450.000,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	990.450.000,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	990.450.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	427.122.830.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	427.122.830.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	427.122.830.000,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	60.211.000.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	231.211.830.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	135.700.000.000,00
	Jumlah Belanja	2.492.874.051.957,00
	Total Surplus/(Defisit)	-30.375.821.334,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.875.821.334,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.875.821.334,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	40.875.821.334,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	40.875.821.334,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	32.775.821.334,00
6.1.01.05.01.0037	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD	8.100.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.500.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.500.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	30.375.821.334,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Ngawi, 28 Desember 2023

Bupati



ONY ANWAR HARSONO